

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA

Regi Refian Garis

Univesitas Galuh, Indonesia

Email : regirefiangaris@unigal.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dari kebijakan publik nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat grassroot, tempat kebijakan berinteraksi langsung dengan dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa melalui program tata kelola dan digitalisasi pariwisata, dengan menekankan peran pemerintah desa sebagai aktor pelaksana kebijakan, hambatan implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan utama perangkat desa, selama enam bulan. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Smith (1973) yang meliputi dimensi idealized policy, target group, implementing organization, dan environmental factors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan digitalisasi pariwisata telah selaras dengan tujuan pembangunan desa, namun dalam praktik masih ditemukan kesenjangan implementasi akibat keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta faktor lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung. Pemerintah desa terbukti memegang peran strategis sebagai aktor politik-administratif dalam mengarahkan implementasi kebijakan, meskipun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi antaraktor dan konteks lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan digitalisasi pariwisata desa sebagai bagian integral dari analisis implementasi kebijakan publik dalam perspektif ilmu pemerintahan, sehingga memperkaya kajian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan desa berbasis kebijakan.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan Publik, Pembangunan Desa*

ABSTRACT

Village development is a strategic component of national public policy aimed at strengthening local government capacity and improving community welfare. From a governmental science perspective, the success of village development is largely determined by the effectiveness of public policy implementation at the grassroots

level, where policies directly interact with community social dynamics. This study aims to analyze the implementation of public policy in village development through tourism governance and digitalization programs, emphasizing the role of village governments as policy implementers, implementation barriers, and the effectiveness of policies in improving community welfare. The study used a qualitative approach, focusing on Tanjungsari Village, Sadananya District, Ciamis Regency. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies with key informants from village officials over a six-month period. Data analysis was conducted using Smith's (1973) policy implementation theoretical framework, which encompasses the dimensions of idealized policy, target group, implementing organization, and environmental factors. The results indicate that normatively, tourism digitalization policies align with village development goals. However, in practice, implementation gaps remain due to limited apparatus capacity, low community digital literacy, and less than fully supportive environmental factors. Village governments have been shown to play a strategic role as political-administrative actors in guiding policy implementation, although policy effectiveness is highly dependent on synergy between actors and the local context. The novelty of this research lies in positioning village tourism digitalization as an integral part of the analysis of public policy implementation from a governmental science perspective, thus enriching the study of the role of village governments in policy-driven village development.

Keywords: *Public Policy Implementation, Village Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari kebijakan publik nasional yang diarahkan untuk memperkuat struktur pemerintahan lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pembangunan desa tidak semata dipahami sebagai proses pembangunan fisik, tetapi sebagai proses politik-administratif yang melibatkan peran negara, kapasitas kelembagaan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

kebijakan publik (Dwiyanto, 2018). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik diimplementasikan pada level pemerintahan paling bawah (grassroot), karena pada level inilah kebijakan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat lokal (Winarno, 2016).

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan. Model implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa implementasi merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aktor pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dirumuskan (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kapasitas aparatur, serta dinamika sosial masyarakat desa. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung (Edwards III, 1980). Oleh sebab itu, kajian implementasi kebijakan publik di tingkat desa menjadi penting dalam ilmu pemerintahan, khususnya untuk memahami hubungan antara kebijakan, aktor pelaksana, dan realitas sosial di lapangan.

Pembangunan desa memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Regulasi ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berbasis potensi lokal, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata desa. Selain itu, arah kebijakan

pembangunan desa juga diperkuat oleh regulasi-regulasi turunan yang mendorong inovasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan yang berorientasi pada prinsip *good governance* (UNDP, 1997).

Dalam konteks empiris, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam dan sosial budaya yang cukup menjanjikan, namun belum sepenuhnya terkelola secara optimal. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa pengelolaan potensi wisata desa masih menghadapi keterbatasan dalam aspek tata kelola kelembagaan, kapasitas aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen pendukung pembangunan. Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen dalam mendorong pengembangan pariwisata desa, namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka kebijakan pembangunan desa. Situasi ini mencerminkan tantangan umum pemerintahan desa dalam menerjemahkan kebijakan normatif ke dalam praktik pembangunan yang berkelanjutan di tingkat grassroot.

Arah pembangunan desa di Indonesia mengalami pergeseran paradigma, dari pendekatan *top-down* yang bersifat sentralistik menuju

pendekatan *bottom-up* yang menekankan kemandirian desa dan partisipasi masyarakat. Pada fase awal, desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan, sementara pemerintah pusat menjadi aktor dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, seiring dengan era desentralisasi dan penguatan otonomi daerah, pemerintah desa kini memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan paradigma ini menuntut peningkatan kapasitas pemerintahan desa agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif, responsif, dan akuntabel (Dwiyanto, 2018), termasuk dalam konteks Desa Tanjungsari yang sedang berada pada fase transisi menuju penguatan tata kelola pembangunan berbasis potensi lokal.

Salah satu instrumen pembangunan desa yang berkembang pesat adalah digitalisasi pariwisata desa. Digitalisasi pariwisata dipandang sebagai strategi kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperluas akses informasi, serta meningkatkan daya saing desa dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti website desa wisata dan media sosial, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi tata kelola, memperkuat promosi destinasi, serta mendorong partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan pariwisata. Praktik ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (UNDP, 1997). Namun demikian, sebagaimana terlihat pada kondisi eksisting Desa Tanjungsari, implementasi kebijakan digitalisasi pariwisata masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dan infrastruktur pendukung (Winarno, 2016).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas pembangunan desa, pariwisata desa, dan digitalisasi secara terpisah, kajian yang secara khusus menempatkan digitalisasi pariwisata sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik dalam perspektif ilmu pemerintahan masih relatif terbatas. Sebagian besar studi cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi atau manajemen pariwisata, sementara dimensi implementasi kebijakan, peran pemerintah desa sebagai aktor pelaksana, serta efektivitas kebijakan di tingkat grassroot—seperti yang terjadi di Desa Tanjungsari—belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki gap penelitian pada aspek analisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa, khususnya dalam program tata kelola dan digitalisasi pariwisata, dengan menekankan pada peran pemerintah desa, hambatan

implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa, khususnya pada program tata kelola dan digitalisasi pariwisata. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika kebijakan, peran aktor pemerintahan, serta konteks sosial yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat grassroot (Creswell, 2018; Moleong, 2019). Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis selama enam bulan, dengan informan utama perangkat desa yang dipilih secara purposive karena memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis temuan penelitian dikaitkan dengan kerangka implementasi kebijakan Smith (1973) untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor

lingkungan dalam implementasi kebijakan pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa melalui program tata kelola dan digitalisasi pariwisata. Pembahasan diarahkan untuk mengisi gap penelitian yang selama ini masih terbatas, khususnya terkait peran pemerintah desa sebagai aktor pelaksana kebijakan, hambatan implementasi di tingkat grassroot, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus analisis ini relevan dengan kajian ilmu pemerintahan karena menempatkan implementasi kebijakan sebagai arena utama interaksi antara kebijakan, aktor pemerintahan, dan masyarakat lokal (Suharto, 2021; Dwiyanto, 2020). Untuk menjelaskan dinamika tersebut, analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Smith (1973) yang memandang implementasi sebagai proses perubahan sosial dan politik yang dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu *idealized policy*, *target group*, *implementing organization*, dan *environmental factors*.

1. Idealized Policy: Kebijakan Ideal dalam Pembangunan Desa

Dimensi *idealized policy* merujuk pada tujuan normatif, nilai, dan desain kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks

pembangunan desa, kebijakan tata kelola dan digitalisasi pariwisata secara normatif dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kemandirian desa, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Kebijakan pembangunan desa saat ini secara konseptual diarahkan untuk menciptakan desa yang berdaya, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi (Yuliawati & Iskandar, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, kebijakan digitalisasi pariwisata desa telah selaras dengan tujuan pembangunan desa dan prinsip *good governance*. Digitalisasi diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas akses informasi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan destinasi wisata, serta memperkuat promosi potensi desa, sebagaimana juga ditemukan dalam studi-studi terbaru tentang tata kelola pariwisata desa berbasis digital (Hanum & Sari, 2020; Prasetyo & Budi, 2022). Namun, dalam praktiknya, idealisasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan secara operasional di tingkat desa. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya pemahaman aparatur desa mengenai substansi kebijakan serta kecenderungan kebijakan dipahami sebagai proyek teknis jangka pendek, bukan sebagai instrumen perubahan tata kelola pemerintahan desa.

Kesenjangan antara kebijakan ideal dan realitas implementasi ini menunjukkan bahwa perumusan

kebijakan yang bersifat normatif belum sepenuhnya disertai dengan strategi implementasi yang kontekstual terhadap kondisi desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suharto (2021) yang menyebutkan bahwa banyak kebijakan pembangunan desa gagal mencapai tujuan karena lemahnya proses translasi kebijakan dari level normatif ke level operasional. Dengan demikian, dimensi *idealized policy* dalam pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam menjembatani visi kebijakan dengan kapasitas pelaksana di tingkat grassroot.

2. Target Group: Masyarakat Desa sebagai Sasaran Kebijakan

Dimensi *target group* dalam model Smith merujuk pada kelompok sasaran kebijakan yang menjadi objek sekaligus subjek dari implementasi kebijakan. Dalam program tata kelola dan digitalisasi pariwisata, target kebijakan mencakup masyarakat desa, kelompok sadar wisata, pelaku usaha lokal, serta aparatur desa itu sendiri. Kebijakan ini menuntut adanya perubahan perilaku, peningkatan literasi digital, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata desa (Safitri & Ibrahim, 2021).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa respons kelompok sasaran terhadap kebijakan digitalisasi pariwisata bersifat beragam. Sebagian masyarakat dan pengelola wisata menunjukkan antusiasme terhadap pemanfaatan teknologi digital karena dinilai mampu meningkatkan akses

pasar dan peluang ekonomi, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Mendrofa dan Siregar (2019) serta Prasetyo dan Budi (2022). Namun, di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang masih bersikap pasif dan belum sepenuhnya terlibat dalam implementasi kebijakan. Rendahnya literasi digital, keterbatasan pengetahuan, serta kekhawatiran terhadap perubahan sosial menjadi faktor yang memengaruhi respons kelompok sasaran, sebagaimana dikemukakan oleh Yuliawati dan Iskandar (2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat desa tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kesiapan sosial kelompok sasaran. Tanpa strategi pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan, kebijakan berpotensi tidak menghasilkan perubahan yang signifikan (Dwiyanto, 2020). Oleh karena itu, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun kesadaran, partisipasi, dan kapasitas masyarakat sebagai target utama kebijakan.

3. Implementing Organization: Pemerintah Desa sebagai Aktor Pelaksana

Dimensi *implementing organization* menempatkan organisasi pelaksana kebijakan sebagai aktor kunci dalam proses implementasi. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan

sebagai pelaksana utama kebijakan tata kelola dan digitalisasi pariwisata. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program konkret, mengoordinasikan aktor terkait, serta memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan (Winarno, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sangat menentukan arah dan efektivitas implementasi kebijakan. Pemerintah desa yang memiliki kepemimpinan adaptif, kapasitas administratif yang memadai, serta kemampuan membangun jejaring dengan aktor eksternal cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi pariwisata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adiwidjaja dan Yuwono (2023) yang menegaskan bahwa kapasitas aparatur dan kepemimpinan lokal merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pembangunan desa.

Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas teknis aparatur, dan lemahnya koordinasi internal menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa implementasi kebijakan publik di tingkat grassroot tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Pemerintah desa bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi aktor politik-administratif yang memiliki peran strategis dalam

mengarahkan perubahan sosial melalui kebijakan publik (Dwiyanto, 2020). Berdasarkan pembahasan tersebut, peran pemerintah desa sebagai *implementing organization* menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat grassroot. Untuk memperjelas hubungan antara kebijakan, aktor pelaksana, respons masyarakat, dan faktor lingkungan, gambar berikut penulis disajikan:



Gambar 1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Desa

(Sumber : Hasil penelitian, 2025)

4. Environmental Factors: Faktor Lingkungan dalam Implementasi Kebijakan

Dimensi *environmental factors* mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan teknologi yang memengaruhi proses implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, faktor lingkungan menjadi salah satu penentu utama keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan digitalisasi pariwisata desa. Lingkungan sosial masyarakat desa yang masih kuat dengan nilai-nilai tradisional, keterbatasan infrastruktur digital, serta kondisi ekonomi lokal memengaruhi tingkat adopsi kebijakan, sebagaimana diungkapkan dalam studi Yulianti dan Iskandar (2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung, seperti ketersediaan jaringan internet, dukungan pemerintah daerah, serta adanya aktor penggerak lokal, mampu mempercepat proses implementasi kebijakan. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif menjadi faktor penghambat implementasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hanum dan Sari (2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pariwisata sangat ditentukan oleh kesiapan ekosistem sosial dan teknologi di tingkat lokal.

Efektivitas Kebijakan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi kebijakan tata kelola dan digitalisasi pariwisata desa memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan peluang ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas lokal (Prasetyo & Budi, 2022). Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan ideal, kesiapan kelompok sasaran, kapasitas pemerintah desa sebagai pelaksana, serta kondisi lingkungan yang mendukung.

Dengan menggunakan model Smith (1973), penelitian ini mengisi gap kajian implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa dengan menunjukkan bahwa kegagalan atau keberhasilan kebijakan tidak dapat dijelaskan secara parsial. Implementasi kebijakan merupakan proses perubahan sosial-politik yang kompleks dan dinamis, sehingga memerlukan pendekatan holistik dalam analisis dan praktik pemerintahan desa. Temuan ini memperkuat posisi ilmu pemerintahan dalam menjelaskan bagaimana kebijakan publik bekerja di tingkat grassroot dan bagaimana pemerintah desa memainkan peran strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Peneliti sajikan Tabel Pemetaan Teori Implementasi Kebijakan Smith (1973) terhadap Temuan Empiris Penelitian sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Pemetaan Teori Implementasi Kebijakan Smith (1973) terhadap Temuan Empiris Penelitian

Dimensi Smith (1973)	Makna Utama	Temuan di Lapangan	Implikasi bagi Ilmu Pemerintahan
Idealized Policy	Kebijakan dirancang sebagai tujuan dan visi ideal pemerintah.	Kebijakan digitalisasi pariwisata sudah diarahkan pada kesejahteraan desa, tetapi dalam praktik masih dipahami sebagai kegiatan teknis semata.	Menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat desa.
Target Group	Masyarakat sebagai sasaran sekaligus pelaku kebijakan.	Respons masyarakat beragam; sebagian menerima digitalisasi, sebagian lain pasif karena keterbatasan literasi digital.	Menegaskan pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan desa.
Implementing Organization	Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.	Pemerintah desa berperan utama, namun efektivitasnya bergantung pada kapasitas aparatur dan kepemimpinan.	Menguatkan posisi pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan publik.
Environmental Factors	Kondisi lingkungan yang memengaruhi kebijakan.	Infrastruktur digital dan kondisi sosial budaya sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan.	Menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa harus disesuaikan dengan konteks lokal.

(Sumber : hasil penelitian, 2025)

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa yang secara eksplisit menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama (implementing organization) dalam kerangka ilmu pemerintahan, bukan sekadar sebagai unit administratif pelaksana program. Penelitian ini juga mengintegrasikan program digitalisasi pariwisata desa ke dalam analisis implementasi kebijakan publik menggunakan model Smith (1973), sehingga mampu menjelaskan secara

komprehensif hubungan antara kebijakan ideal, respons masyarakat, kapasitas kelembagaan pemerintah desa, dan faktor lingkungan di tingkat grassroot. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan aspek ekonomi atau manajemen pariwisata, studi ini menegaskan dimensi politik-administratif pemerintahan desa sebagai kunci efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa, khususnya melalui program tata kelola dan digitalisasi pariwisata, merupakan proses yang kompleks dan bersifat kontekstual. Dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Smith (1973), penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan di tingkat grassroot sangat ditentukan oleh keselarasan antara kebijakan ideal, kesiapan kelompok sasaran, kapasitas kelembagaan pemerintah desa sebagai aktor pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi yang melingkupinya. Pemerintah desa terbukti memainkan peran strategis sebagai aktor politik-administratif dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pemerintahan dan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih

ditemukan kesenjangan implementasi yang menuntut penguatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan lingkungan kebijakan yang lebih kondusif agar pembangunan desa berbasis digital dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia: Perspektif governance*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Hanum, F., & Sari, D. S. (2020). Konsep smart tourism sebagai implementasi digitalisasi di bidang pariwisata. *Journal of Sustainable Tourism Research*, 2(1), 14–17. DOI: <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i2.25787>
- Prasetyo, H., & Budi, M. B. (2022). Urgensi implementasi smart tourism untuk kemajuan pariwisata Indonesia. *Journal of Tourism and Economic*, 5(2), 147–160. DOI: <https://doi.org/10.36594/jtec/5z.vqmg87>
- Safitri, A., & Ibrahim, S. I. (2021). Tata kelola pengembangan pariwisata: Sebuah kajian pustaka terstruktur. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 166–175.

- DOI:
<https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.689>
- Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209.
<https://doi.org/10.1007/BF01405732>
- Suharto, E. (2021). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik: Peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 1–15.
- Winarno, B. (2020). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Edisi revisi). CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yuliawati, R., & Iskandar, I. (2023). Peran pemerintah dalam mewujudkan potensi pengembangan digitalisasi di desa tertinggal. *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 205–211.
DOI:
<http://dx.doi.org/10.29210/02020344>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781506386706>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Smith, T. B. (1973). The policy implementation process. *Policy Sciences*, 4(2), 197–209.
<https://doi.org/10.1007/BF01405732>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
<https://digitallibrary.un.org/record/3831660>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>